

Evaluasi Standar Pelayanan Minimal di Sekolah Dasar

(Evaluation of Minimum Service Standards In Elementary Schools)

Agus Limpu¹, Kodirun² & Makklau³

¹ Program PascaSarjana Pendidikan Matematika UHO; email: aguslimpu01@gmail.com

² Pendidikan Matematika FKIP dan PPs UHO; email: kodirun_zuhry@yahoo.co.id

³ Pendidikan Matematika FKIP dan PPs UHO; email : kulau_tenri@yahoo.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kendala dan solusi dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) pada mata pelajaran matematika di sekolah dasar pada kecamatan Abeli kota Kendari. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan model kesenjangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik penentuan subjek menggunakan *purposive sampling* yaitu subjek dipilih dengan pertimbangan status akreditasi sekolah sehingga subjek yang dipilih adalah SDN 33 Kendari (akreditasi A), SDN 58 Kendari (akreditasi B) dan SDN 23 Kendari (akreditasi C). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif presentase. Hasil penelitian diperoleh data: (1) SDN 33 Kendari, SDN 58 Kendari dan SDN 23 Kendari belum mencapai SPM karena untuk mencapai SPM, sekolah harus memperoleh tingkat pencapaian 100%. Pelaksanaan SPM oleh SDN 33 Kendari sebesar 83,68% dengan kategori baik, pelaksanaan SPM di SDN 58 Kendari sebesar 82,75% dengan kategori baik. Begitupula pelaksanaan SPM di SDN 23 Kendari sebesar 83,46% dengan kategori baik, (2) kendala yang dihadapi adalah terbatasnya alat peraga matematika sehingga mempengaruhi kualitas pembelajaran matematika di kelas, penerapan kurikulum 2013 khususnya penerapan RPP belum maksimal (RPP masih sebatas kewajiban pemenuhan syarat administratif), rendahnya pengetahuan dan keterampilan guru dalam menyusun instrumen penilaian mata pelajaran matematika (masih cenderung ke penilaian kognitif), kurangnya keterlibatan komite sekolah dalam penyusunan RKT maupun peningkatan kualitas pendidikan, (3) solusi yang dapat dilakukan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal yang dihadapi adalah membuat skala prioritas pengadaan alat peraga matematika secara bertahap maupun program peningkatan kreatifitas guru dalam membuat alat peraga sederhana, pelatihan/workshop penerapan pembelajaran dalam kurikulum 2013 dan penyusunan instrumen penilaian mata pelajaran matematika, serta peran aktif komite sekolah dalam peningkatan kualitas pendidikan.

Kata kunci: Evaluasi, Standar Pelayanan Minimal, SPM

Abstract: This study aims to describe the obstacles and solutions in the implementation of minimum service standards (MSS) in mathematics in elementary schools in Abeli sub-district, Kendari city. This research is an evaluation research with a gap model. The approach used is a qualitative approach. The technique of determining the subject used *purposive sampling*, namely the subject was selected with consideration of the school accreditation status so that the selected subjects were SDN 33 Kendari (accreditation A), SDN 58 Kendari (accreditation B) and SDN 23 Kendari (accreditation C). Data were collected through observation, interviews and documentation and analyzed using percentage descriptive analysis. The results of the study obtained data: (1) SDN 33 Kendari, SDN 58 Kendari and SDN 23 Kendari have not reached the MSS because to achieve the MSS, schools must obtain an attainment level of 100%. SDN 33 Kendari has fulfilled the SPM by 83.68% in a good category. SDN 58 Kendari has fulfilled the MSS by 82.75% in a good category. Likewise, SDN 23 Kendari has fulfilled the MSS by 83.46% in a good category, (2) the obstacles faced by SDN 33 Kendari, SDN 58 Kendari and SDN 23 Kendari are the limited mathematics teaching aids that affect the quality of learning mathematics in the classroom, the application of the 2013 curriculum, especially the implementation of RPP has not been maximal (RPP is still limited to fulfilling administrative requirements), the lack of knowledge and skills of teachers in preparing

mathematics assessment instruments (still tends to cognitive assessment), lack of involvement of school committees in the preparation of RKT and improving the quality of education 3) solutions that can be done to meet the minimum service standards faced by SDN 33 Kendari, SDN 58 Kendari and SDN 23 Kendari are to make a priority scale for the procurement of mathematics teaching aids in stages and programs to increase teacher creativity in making simple teaching aids, training / application workshops learners ran in the 2013 curriculum and the preparation of assessment instruments for mathematics subjects, as well as the active role of the school committee in improving the quality of education.

Keywords: *Evaluation, Minimum Service Standards, MSS*

PENDAHULUAN

Pemerintah terus berupaya memenuhi hak setiap warga negaranya dalam memperoleh layanan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang mewajibkan pemerintah bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk di Indonesia, salah satunya melalui program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun terdiri dari Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

Kualitas pendidikan pada jenjang tertentu tidak dapat terlepas dari kualitas pada jenjang di bawahnya. Pendidikan dasar merupakan pondasi untuk pengembangan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi (PT). Tanpa mengikuti pendidikan dasar, anak tidak dapat menempuh pendidikan pada jenjang berikutnya. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan juga harus dimulai pada peningkatan mutu pendidikan dasar. Keberhasilan peserta didik pada jenjang pendidikan dasar sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan pada SD. Dengan demikian, pemerintah harus tanggap agar dapat mengembangkan kompetensi guru sebagai pendidik dan efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah khususnya pada jenjang SD.

Sadar akan pentingnya kompetensi guru serta sarana dan prasarana dalam menentukan keberhasilan pendidikan nasional, maka pemerintah menetapkan standar dalam pelayanan pendidikan dasar sebagai tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan daerah. Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan pelaksanaan di sentralisasi penyelenggaraan kewenangan di bidang pendidikan. Penerapan SPM dimaksudkan untuk memastikan bahwa di setiap

sekolah dan madrasah terpenuhi kondisi minimum yang dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang memadai. SPM diharapkan mampu mempersempit kesenjangan mutu pendidikan yang kedepannya juga diharapkan berimplikasi pada mengecilnya kesenjangan sosial ekonomi. Standar pelayanan minimal mulai diberlakukan tahun 2011 dengan tahapan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah pelatihan guru dan tenaga pendidik.

Dengan ditetapkan standar pelayanan minimal bidang pendidikan maka setiap daerah perlu menyusun perencanaan program/kegiatan untuk mencapai SPM. Untuk mengukur sejauh mana kinerja dinas pendidikan telah mencapai SPM atau belum maka dinas pendidikan perlu melakukan pemetaan terhadap kinerja layanan dinas pendidikan/depag serta sekolah-sekolah (SMP/MTs). Dari pemetaan tersebut diketahui kinerja mana yang belum mencapai SPM dan kinerja mana yang sudah mencapai SPM. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, sekolah perlu menganalisis pencapaian masing-masing indikator yang tercantum dalam SPM bidang pendidikan. Hasil analisis kondisi pencapaian SPM digunakan sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijakan, program, kegiatan, dan juga pembiayaan ketika menyusun dokumen rencana strategis pencapaian SPM.

Dengan demikian dalam mengembangkan rencana peningkatan mutu pendidikan setiap Kabupaten/Kota perlu memperhatikan kondisi pencapaian SPM di daerah masing-masing. Setiap tahun program pencapaian SPM perlu dilaksanakan sampai SPM benar-benar tercapai. Pelaksanaan dan capaian program juga di monitor dan dievaluasi, sehingga diketahui indikator apa saja yang belum dicapai, dan berapa perkiraan biaya yang diperlukan untuk mencapai SPM, sehingga diharapkan semua Kabupaten/Kota telah mencapai SPM. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang evaluasi standar pelayanan minimal pada sekolah dasar (SD) di kecamatan Abeli kota Kendari tahun ajaran 2019/2020.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian evaluasi yaitu sebuah kegiatan pengumpulan data atau informasi untuk dibandingkan dengan kriteria setelah itu diambil kesimpulan (Arikanto, 2010: 36). Model evaluasi yang digunakan yaitu model ketimpangan atau kesenjangan (*The Discrepancy Evaluation Model*) karena penelitian ini akan membandingkan pelaksanaan SPM dengan kriteria atau indikator menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

Teknik pengambilan subjek penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Sugiyono (2015: 218) mengatakan “*purposive sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu”. Dengan pertimbangan status akreditasi sekolah maka peneliti mengambil informan kunci yaitu kepala sekolah dan guru di sekolah yang memiliki akreditasi A, B dan C. Sekolah yang dipilih adalah SDN 33 Kendari (akreditasi A), SDN 58 Kendari (akreditasi B) dan SDN 23 Kendari (akreditasi C).

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan menelaah semua data yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, selanjutnya dilakukan penskoran atau penilaian. Hasil penskoran dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif presentase (Riduwan, 2011: 89). Tujuan penggunaan metode analisis deskriptif presentase adalah untuk memberikan gambaran ketercapaian pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar di SDN 33 Kendari, SDN 58 Kendari dan SDN 23 Kendari.

HASIL PENELITIAN

Data hasil penelitian diperoleh dengan cara melakukan analisis data, yaitu dengan mengolah data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, selanjutnya mendeskripsikan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami oleh semua pihak. Data yang dikumpulkan difokuskan pada mata pelajaran matematika di sekolah dasar. Evaluasi standar pelayanan minimal pendidikan dasar dilakukan melalui beberapa tahap sesuai dengan evaluasi model kesenjangan. Pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar ini dilihat dari enam jenis pelayanan yang terdiri dari sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, penilaian pendidikan, penjaminan mutu dan manajemen sekolah. Berikut adalah penjabaran dari ke enam jenis pelayanan tersebut.

1. Jenis Pelayanan Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan SPM pada jenis pelayanan sarana dan prasarana di ketiga subjek penelitian telah mencapai tingkat pencapaian 100% untuk indikator pencapaian (IP) 1. Hal itu berarti untuk indikator pencapaian 1 tidak terdapat kesenjangan atau kesenjangan 0%. Ketersediaan buku teks telah sesuai dengan jumlah siswa dari kelas I hingga kelas VI. Pengadaan buku pegangan siswa berasal dari dana BOS. Buku teks yang digunakan sebagai pegangan siswa dipinjamkan oleh sekolah. Buku dikembalikan setelah Ujian Akhir Semester (UAS). SDN 33 Kendari dan SDN 23 Kendari telah mencapai tingkat pencapaian 100% untuk indikator pencapaian (IP) 3, akan tetapi jumlahnya belum memenuhi untuk semua kelas. Lain halnya dengan

SDN 58 Kendari yang belum memiliki beberapa alat peraga matematika seperti model bilangan atau pecahan dan papan paku. Jumlahnya pun masih terbatas, belum memenuhi untuk semua kelas. Tingkat pencapaian 83,33%. Pengadaan buku pegangan siswa berasal dari dana BOS atau bantuan dari dinas Pendidikan Kota Kendari.

Untuk buku pengayaan dan referensi dari ketiga subjek penelitian telah mencapai tingkat pencapaian 100% untuk indikator pencapaian (IP) 3. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan diketahui terdapat banyak buku yang memiliki judul yang sama sampai 20 eksamplar. Selain itu, buku referensi juga jarang digunakan oleh guru, mereka menggunakan buku pegangan guru sebagai sumber belajar utama dalam pembelajaran matematika di kelas. Buku pengayaan dan referensi digunakan oleh siswa jika terdapat tugas yang mengharuskan mereka untuk mencari bahan/materi di perpustakaan. Pengadaan buku pengayaan dan referensi yang dimiliki sekolah berasal dari sumbangan berbagai pihak dan dana pendanaan BOS. Pencapaian SPM berdasarkan jenis pelayanan sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1.

Pencapaian SPM Berdasarkan Jenis Pelayanan Sarana dan Prasarana

Jenis Pelayanan	Sekolah	Indikator Pencapaian (IP)	Tingkat Pencapaian	Tingkat kesenjangan
Sarana dan Prasarana	SDN 33 Kendari	IP 1	100.00	0.00
		IP 3	100.00	0.00
		IP 4	100.00	0.00
	SDN 58 Kendari	IP 1	100.00	0.00
		IP 3	83,33	16,67
		IP 4	100.00	0.00
	SDN 23 Kendari	IP 1	100.00	0.00
		IP 3	100.00	0.00
		IP 4	100.00	0.00

Secara umum kendala yang dihadapi sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran khususnya pengadaan alat peraga matematika adalah anggaran yang dimiliki sekolah tidak cukup untuk melengkapi semua alat peraga matematika. Sekolah cenderung memenuhi alat peraga IPA dibanding alat peraga matematika. Sekolah harus mampu menyusun skala prioritas dalam pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran khususnya pengadaan alat peraga matematika sehingga semua alat peraga dapat terpenuhi secara bertahap.

2. Jenis Pelayanan Pendidik dan Kependidikan

Semua guru dari ketiga subjek penelitian telah memenuhi standar 24 jam/minggu bahkan ada yang melebihi melebihi standar yaitu 37,5 jam per minggu. Untuk mata pelajaran matematika dialokasikan waktu 6 jam/minggu. Berdasarkan dokumen Kurikulum 2013 yang dimiliki sekolah, guru bekerja pada hari Senin – Jumat dari pukul 6:45 – 13:00. Karena jumlah jam bekerja memenuhi standar maka tingkat pencapaian indikator ini adalah 100%. Guru tetap dan tenaga kependidikan tetap diwajibkan datang setiap hari hingga kegiatan belajar mengajar selesai, namun untuk guru tidak tetap dapat datang sewaktu ada jadwal mengajar saja. Dalam indikator ini tidak terdapat kesenjangan atau kesenjangan sebesar 0%.

3. Jenis Pelayanan Kurikulum

Ketiga subjek penelitian telah menerapkan kurikulum 2013 (K13), oleh karena itu tingkat pencapaian pada IP 6 dan IP 7 adalah 100%. Berdasarkan kalender pendidikan yang terdapat di dokumen K13, jumlah minggu efektif dalam 1 tahun adalah 41 minggu dan jumlah jam kegiatan belajar telah melebihi jam minimal dalam SPM. Pengembangan dokumen K13 dibahas bersama pada forum KKG kecamatan Abeli. Selain itu pula telah dilakukan monitoring pelaksanaan K13 secara berkala oleh masing-masing sekolah. Kendala yang terdapat dalam pelaksanaan K13 dibahas bersama dalam forum KKG.

Tabel 2.

Pencapaian SPM Berdasarkan Jenis Pelayanan Kurikulum

Jenis Pelayanan	Sekolah	Indikator Pencapaian (IP)	Tingkat Pencapaian	Tingkat kesenjangan
Pelayanan kurikulum	SDN 33 Kendari	IP 6	100.00	0.00
		IP 7	100.00	0.00
		IP 8	50.00	50.00
	SDN 58 Kendari	IP 6	100.00	0.00
		IP 7	100.00	0.00
		IP 8	50.00	50.00
	SDN 23 Kendari	IP 6	100.00	0.00
		IP 7	100.00	0.00
		IP 8	46,43	53,57

Tingkat ketercapaian penerapan RPP SDN 33 Kendari sebesar 50%, SDN 58 Kendari sebesar 50% dan SDN 23 Kendari sebesar 46,43%. Sebenarnya semua guru dari ketiga subjek penelitian baik SDN 33 Kendari, SDN 58 Kendari dan SDN 23 Kendari telah membuat RPP berdasarkan subtema atau mata pelajaran yang mereka ampu. Namun dalam penerapannya, guru terkadang tidak berpedoman pada RPP

yang telah dibuat, mereka hanya memiliki garis besar proses pembelajarannya saja. Adapula yang cenderung hanya melihat materi apa yang akan diajarkan kemudian mengajarkannya tanpa membuat RPP terlebih dahulu. Guru menggunakan pengalaman mengajar mereka sehingga terkadang RPP dibuat jika ada supervisi kepala sekolah atau monitoring dari pengawas atau pihak dari dinas pendidikan sehingga terkesan RPP sebagai pemenuhan administrasi mengajar guru saja. Kendala yang dihadapi yaitu banyaknya guru yang tidak selalu membuat dan menerapkan RPP, sehingga pembelajaran tidak efektif dan efisien. Setiap guru diharuskan menyusun perencanaan pembelajaran dengan membuat RPP pada awal semester sehingga guru dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang direncanakan. Selain itu agar tugas guru pada akhir semester dapat berkurang.

4. Jenis Pelayanan Penilaian Pendidikan

Berdasarkan data yang diperoleh, guru pada ketiga subjek penelitian belum melaksanakan program penilaian secara menyeluruh sesuai dengan indikator pencapaian dalam SPM. Tingkat pencapaiannya IP 9 pada SDN 33 Kendari dan SDN 58 Kendari sebesar 68,75% dengan kesenjangan sebesar 31,25% dan SDN 23 Kendari sebesar 68,30% dengan kesenjangan sebesar 31,70%.

Tabel 3. Pencapaian SPM Berdasarkan Jenis Pelayanan Penilaian

Jenis Pelayanan	Sekolah	Indikator Pencapaian (IP)	Tingkat Pencapaian	Tingkat kesenjangan
Penilaian Pendidikan	SDN 33 Kendari	IP 9	68,75	31,25
	SDN 58 Kendari	IP 9	68,75	31,25
	SDN 23 Kendari	IP 9	68,30	31,70

Guru jarang mengembangkan instrumen penilaian sehingga pelaksanaan program penilaian biasanya menggunakan instrumen yang telah ada. Selain itu pula pengembangan instrumen penilaian tidak selalu sesuai dengan indikator atau kompetensi dasar matematika dan hasil penilaian juga tidak selalu digunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa. Penilaian cenderung fokus pada penilaian kognitif saja, sedangkan penilaian sikap dan keterampilan hanya berdasarkan pengamatan saat pembelajaran, belum menggunakan instrumen penilaian sikap dan keterampilan. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian SPM berdasarkan jenis pelayanan penilaian pendidikan yaitu kurangnya kemampuan guru dalam mengembangkan instrumen penilaian khususnya penilaian sikap dan keterampilan. Perlu adanya pelatihan/workshop untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam mengembangkan instrumen penilaian.

5. Jenis Pelayanan Manajemen sekolah

Hasil wawancara dengan guru dan kepala sekolah pada ketiga subjek penelitian diperoleh informasi bahwa kepala sekolah telah melakukan supervisi kelas dan umpan balik secara berkala setiap semester. Supervisi dilakukan secara bergilir pada setiap kelas dari kelas I sampai dengan kelas V. Apabila terdapat kekurangan atau masalah dalam pembelajaran, kepala sekolah memberikan umpan balik dan mendiskusikannya dalam pertemuan guru. Oleh karena itu tingkat ketercapaian pada IP 10 telah mencapai 100%. Begitupula pada tingkat ketercapaian pada IP 11 telah mencapai 100%. Setiap guru telah melaporkan hasil belajar siswa kepada kepala sekolah. Guru mengumpulkan laporan hasil belajar siswa menurut kelasnya masing-masing. Siswa yang belum memenuhi KKM dilakukan remedial. Pada akhir semester, sekolah mengundang orang tua/wali murid untuk menyampaikan hasil belajar siswa dalam bentuk raport oleh kepala sekolah melalui guru kelas, sedangkan rekapitulasinya disampaikan ke dinas pendidikan. Oleh karena itu tingkat ketercapaian pada IP 12 telah mencapai 100%.

6. Jenis Pelayanan Manajemen sekolah

Berdasarkan data yang diperoleh, ketiga subjek penelitian belum melaksanakan program manajemen sekolah secara menyeluruh sesuai dengan indikator pencapaian dalam SPM. Tingkat pencapaiannya IP 13 pada SDN 33 Kendari, SDN 58 Kendari dan SDN 23 Kendari mencapai 50% dengan kesenjangan sebesar 50%. Pada awal tahun anggaran, sekolah menyusun Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Penyusunan RKS seharusnya melibatkan peran aktif komite sekolah agar memperoleh masukan kaitannya dengan kualitas layanan sekolah.

Tabel 4.

Pencapaian SPM Berdasarkan Manajemen Sekolah

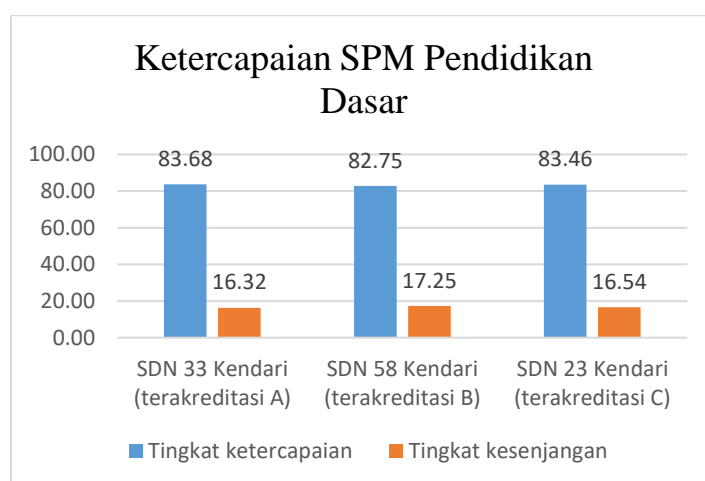
Jenis Pelayanan	Sekolah	Indikator Pencapaian (IP)	Tingkat Pencapaian	Tingkat kesenjangan
Manajemen Sekolah	SDN 33 Kendari	IP 13	50,00	50,00
	SDN 58 Kendari	IP 13	50,00	50,00
	SDN 23 Kendari	IP 13	50,00	50,00

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian SPM berdasarkan jenis pelayanan manajemen sekolah adalah kurangnya peran aktif komite sekolah dalam memberi masukan kaitannya dengan peningkatan layanan sekolah sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RKS. Perlunya peran aktif komite sekolah

dalam memberi masukan kaitannya dengan peningkatan layanan sekolah sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RKS.

PEMBAHASAN

Secara keseluruhan, keterlaksanaan SPM oleh ketiga subjek penelitian penelitian memiliki kategori baik. Berikut tingkat pencapaian pelaksanaan SPM oleh ketiga subjek penelitian penelitian:



Gambar 1. Ketercapaian SPM Pendidikan Dasar

Dari gambar 1 di atas nampak bahwa pelaksanaan SPM perbandingan tingkat pencapaian dengan tingkat kesenjangan lebih besar tingkat pencapaian. Tingkat ketercapaian ketiga subjek penelitian di atas 80%. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah yang memiliki akreditasi A, B atau C sama dalam memberikan pelayanan yang hampir sama. Yang membedakan adalah sekolah terakreditasi A teradministrasi dan terdokumentasi dengan baik setiap kegiatan yang dilakukan dibanding dengan sekolah yang terakreditasi B atau C (Rahman, 2017: 60). Namun jika dilihat secara mikro berdasarkan jenis layanan, nampak SDN 58 Kendari masih kekurangan sarana dan prasarana khususnya alat peraga matematika (tingkat ketercapaian 83,33%). Kurangnya alat peraga matematika akan mempengaruhi kualitas pembelajaran yang diberikan oleh guru. Apalagi terdapat konsep matematika di sekolah dasar yang sifatnya abstrak, sehingga perlu adanya alat peraga untuk menjembatani konsep abstrak menjadi konkrit dalam pembelajaran matematika (Fredy, 2013: 163).

Perbaikan kualitas pendidikan yang salah satunya diindikasikan dengan peningkatan hasil pembelajaran, tidak lepas dari usaha perbaikan dalam pembelajaran. Hasil pembelajaran dipengaruhi beberapa faktor diantaranya

penggunaan alat peraga oleh guru dalam proses pembelajaran. Penggunaan alat peraga dalam pembelajaran matematika di SD sangat membantu meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan terhadap materi matematika yang diajarkan guru (Suwardi, 2014: 297). Untuk menyelesaikan masalah tersebut maka perlu membuat skala prioritas untuk pengadaan alat peraga matematika melalui pendanaan dana BOS. Dapat pula diselesaikan dengan meningkatkan keterampilan dan kreativitas guru dalam membuat alat peraga sederhana dengan menggunakan alat dan bahan yang mudah diperoleh dan harganya terjangkau.

Jika dilihat dari indikator penilaian pendidik dan tenaga kependidikan menunjukkan tingkat pencapaian pada indikator tersebut adalah 100%. Dalam indikator ini tidak terdapat kesenjangan atau kesenjangan sebesar 0%. Artinya bahwa ketiga sekolah memiliki guru dan tenaga kependidikan yang disiplin masuk kerja. Guru bekerja pada hari Senin – Jumat dari pukul 6:45 – 12:45 dan diwajibkan datang setiap hari hingga kegiatan belajar mengajar selesai, kecuali guru tidak tetap dapat datang sewaktu ada jadwal mengajar saja. Kedisiplinan guru ke sekolah tentunya berpengaruh pada intensitasnya masuk ke dalam kelas. Hasil wawancara kepada guru diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan disiplin guru dalam pembelajaran di kelas terlaksana secara optimal dengan adanya peran kepala sekolah. Mengontrol kehadiran guru, memeriksa perangkat pembelajaran, melakukan supervisi, melakukan pembinaan, memberi teguran, memberi sanksi, dan memberi penghargaan. Melakukan pengawasan yang rutin terhadap pelaksanaan tugas guru, membangun komunikasi dan memberikan motivasi kepada guru, sehingga ada pola kerja yang baik dalam mendukung kedisiplinan guru. Selanjutnya melakukan koordinasi, pendampingan, memberikan tugas kepada guru, dan penilaian kepada semua guru (Muai, 2015: 816).

Pada aspek kurikulum, ketiga subjek penelitian baik SDN 33 Kendari, SDN 58 Kendari dan SDN 23 Kendari telah menerapkan kurikulum 2013 (K13), oleh karena itu tingkat pencapaian pada IP 6 dan IP 7 adalah 100%. Lain halnya dengan tingkat ketercapaian penerapan RPP, SDN 33 Kendari sebesar 50%, SDN 58 Kendari sebesar 50% dan SDN 23 Kendari sebesar 47,06%. Sebenarnya semua guru dari ketiga subjek penelitian baik SDN 33 Kendari, SDN 58 Kendari dan SDN 23 Kendari telah membuat RPP berdasarkan subtema atau mata pelajaran yang mereka ampu. Namun dalam penerapannya, terdapat beberapa kegiatan yang tercantum dalam RPP tidak dilaksanakan. Hal ini karena dalam pembelajaran guru melihat respon siswa atau situasi kelas. Langkah ini diambil karena guru fokus pada tujuan pembelajaran atau penyelesaian materi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Zendrato (2016: 72) yang menyebutkan bahwa sebanyak 19% guru dalam

pembelajarannya tidak sesuai dengan RPP. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi kelas yang berubah, ide spontan yang muncul saat mengajar, dan alokasi waktu yang berubah, karena diskusi yang panjang, siswa belum memahami materi yang disampaikan sehingga teknik mengajar yang harus diganti. Untuk mengatasi masalah ini maka guru perlu terus membuka diri terhadap peningkatan kompetensi profesional guru.

Pada aspek penilaian, guru pada ketiga subjek penelitian baik SDN 33 Kendari, SDN 58 Kendari dan SDN 23 Kendari belum melaksanakan program penilaian secara menyeluruh sesuai dengan indikator pencapaian dalam SPM. Tingkat pencapaiannya IP 9 pada SDN 33 Kendari dan SDN 58 Kendari sebesar 68,75% dengan kesenjangan sebesar 31,25% dan SDN 23 Kendari sebesar 68,38% dengan kesenjangan sebesar 31,62%. Selama ini penilaian guru pada mata pelajaran matematika cenderung fokus pada penilaian kognitif saja, sedangkan penilaian sikap dan keterampilan hanya berdasarkan pengamatan saat pembelajaran, belum menggunakan instrumen penilaian sikap dan keterampilan yang terukur. Hal ini karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan guru dalam menyusun instrumen penilaian sikap dan keterampilan. Penilaian dalam K13 merupakan penilaian otentik untuk menilai kemajuan belajar siswa baik pada aspek pengetahuan, sikap maupun keterampilan, sehingga secara eksplisit meminta guru di sekolah untuk seimbang dalam melakukan penilaian pada ketiga ranah tersebut sesuai dengan tujuan yang hendak diukur (Setiadi, 2016: 167). Solusi yang dapat dilakukan adalah melalui pelatihan/workshop penyusunan instrumen penilaian K13 yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan KKG atau kegiatan pengembangan profesi lainnya.

Pada aspek penjaminan mutu, tingkat ketercapaian telah mencapai 100%. Hasil wawancara dengan guru pada kepala sekolah ketiga subjek penelitian baik SDN 33 Kendari, SDN 58 Kendari dan SDN 23 Kendari diperoleh informasi bahwa kepala sekolah telah menjalankan tugas supervisi kelas dan umpan balik secara berkala setiap semester. Supervisi dilakukan secara bergilir pada setiap kelas dari kelas I sampai dengan kelas V. Apabila terdapat kekurangan atau masalah dalam pembelajaran, kepala sekolah memberikan umpan balik dan mendiskusikannya dalam pertemuan guru. Supervisi kepala sekolah lebih pada membantu guru dalam mengatasi kesulitan dalam kegiatan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajarannya (Hartanto, 2019: 2).

Pada aspek manajemen sekolah, ketiga subjek penelitian baik SDN 33 Kendari, SDN 58 Kendari dan SDN 23 Kendari belum melaksanakan program manajemen sekolah secara menyeluruh sesuai dengan indikator pencapaian dalam

SPM. Tingkat pencapaiannya IP 13 pada SDN 33 Kendari, SDN 58 Kendari dan SDN 23 Kendari mencapai 50% dengan kesenjangan sebesar 50%. Pada awal tahun anggaran, sekolah menyusun Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Penyusunan RKS seharusnya melibatkan peran aktif komite sekolah agar memperoleh masukan kaitannya dengan kualitas layanan sekolah. Hasil penelitian Febriana (2019: 162) menyebutkan bahwa peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan sangatlah baik dari segi peningkatan sarana prasarana di sekolah. Komite sekolah memiliki beberapa peranan yang harus dijalankan untuk sekolah seperti memberikan pertimbangan dalam setiap perencanaan dan program yang disusun oleh sekolah dan melakukan kontrol terhadap pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar

Secara menyeluruh pelaksanaan SPM pada SDN 33 Kendari, SDN 58 Kendari dan SDN 23 Kendari belum mencapai SPM Pendidikan Dasar karena untuk mencapai SPM Pendidikan Dasar, sekolah harus memperoleh tingkat pencapaian 100%. Pelaksanaan SPM oleh SDN 33 Kendari sebesar 83,68% dengan kategori baik, SDN 58 Kendari sebesar 82,75% dengan kategori baik. Begitupula pelaksanaan SPM di SDN 23 Kendari sebesar 83,46% dengan kategori baik.

Jika dilihat dari jenis pelayanan maka di SDN 33 Kendari telah memenuhi SPM pada indikator sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan dan jaminan mutu sedangkan yang belum terpenuhi yaitu kurikulum, penilaian pendidikan dan manajemen sekolah. SDN 58 Kendari telah memenuhi SPM pada indikator tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dan jaminan mutu sedangkan yang belum terpenuhi adalah sarana dan prasarana, kurikulum, penilaian pendidikan dan manajemen sekolah. SDN 23 Kendari telah memenuhi SPM pada indikator sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dan jaminan mutu sedangkan yang belum terpenuhi adalah kurikulum, penilaian pendidikan dan manajemen sekolah.

2. Kendala Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar

Secara umum kendala yang dihadapi oleh SDN 33 Kendari, SDN 58 Kendari dan SDN 23 Kendari adalah terbatasnya alat peraga matematika sehingga mempengaruhi kualitas pembelajaran matematika di kelas, penerapan kurikulum 2013 khususnya penerapan RPP belum maksimal (RPP masih sebatas kewajiban pemenuhan syarat administratif), rendahnya pengetahuan dan keterampilan guru dalam menyusun instrumen penilaian mata pelajaran matematika (masih cenderung ke penilaian kognitif), kurangnya keterlibatan komite sekolah dalam penyusunan RKT maupun peningkatan kualitas pendidikan.

3. Solusi Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar

Solusi yang dapat dilakukan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal yang dihadapi oleh SDN 33 Kendari, SDN 58 Kendari dan SDN 23 Kendari adalah membuat skala prioritas pengadaan alat peraga matematika secara bertahap maupun program peningkatan kreatifitas guru dalam membuat alat peraga sederhana, pelatihan/workshop penerapan pembelajaran dalam kurikulum 2013 dan penyusunan instrumen penilaian mata pelajaran matematika, serta peran aktif komite sekolah dalam peningkatan kualitas pendidikan.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. 2010. *Dasar – Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi
- Fredy, S Soenarto. 2013. Pengembangan Multimedia Pembelajaran Matematika pada Materi Bilangan Bulat Kelas IV SDN Lempuyangan I Yogyakarta. *Jurnal Prima Edukasia*, 1 (2), 162-172
- Febriana, L., 2019. Peranan Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MAN 1 Palembang. *Jurnal PAI Raden Fatah*. 1 (2)
- Hartanto, S. 2019. *Modul Pelatihan Penguatan Kepala Sekolah Supervisi dan Penilaian Kinerja Guru (MPPKS - PKG)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
- Muai, 2015. Disiplin Guru dalam Pembelajaran. *Jurnal Manajer Pendidikan*, 9(6), 814-821
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 *Wajib Belajar*. 2008. Jakarta: Kemdikbud

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota*. 2013. Jakarta: Kemdikbud
- Rahman, M. H., Saprudin, Mubarak, H., dan Hamid, F. 2017. Evaluasi Program Ibm Pendampingan Penyusunan Borang Akreditasi Bagi Sekolah Dasar di Kota Ternate. *Titian Ilmu: Jurnal Ilmiah Multi Sciences*, 9 (2), 59 – 65
- Riduwan. 2011. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Saifuddin Azwar. 2005. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Suwardi, Firmiana, M. E., Rohayati. 2014. Pengaruh Penggunaan Alat Peraga terhadap Hasil Pembelajaran Matematika pada Anak Usia Dini. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 2 (4)
- Setiadi, H., 2016. Pelaksanaan Penilaian pada Kurikulum 2013. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*. 20 (2), 166-178
- Zendrato, J. 2016. Tingkat Penerapan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam Pelaksanaan Pembelajaran di Kelas Suatu Studi Kasus di SMA Dian Harapan Jakarta. *Jurnal Scholaria*, 6 (2), 58-73